



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANANG SUJOKO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 670281

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.955.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 1890 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HADIAH Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 2110 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 2187 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. Tanah Seluas 1735 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 394.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2015, HADIAH Rp. 8.000.000
3. LAINNYA, SPECIALIZED ROAD TRAIL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 29.110.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	452.058.652
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.830.168.652
III. HUTANG	Rp.	10.476.673
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.819.691.979

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.